

**PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK TURUT SERTA PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME PENDEKATAN DISKRESI
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

TESIS



Oleh:

RAMADHAN SOFYAN

202320251004

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Pengakuan Hukum Bagi Anak Turut Serta Pelaku
Tindak Pidana Terorisme Pendekatan Diskresi
Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Ramadhan Sofyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251004

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

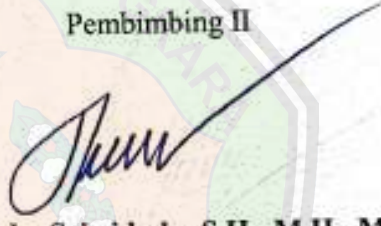
Jakarta, Mei 2025

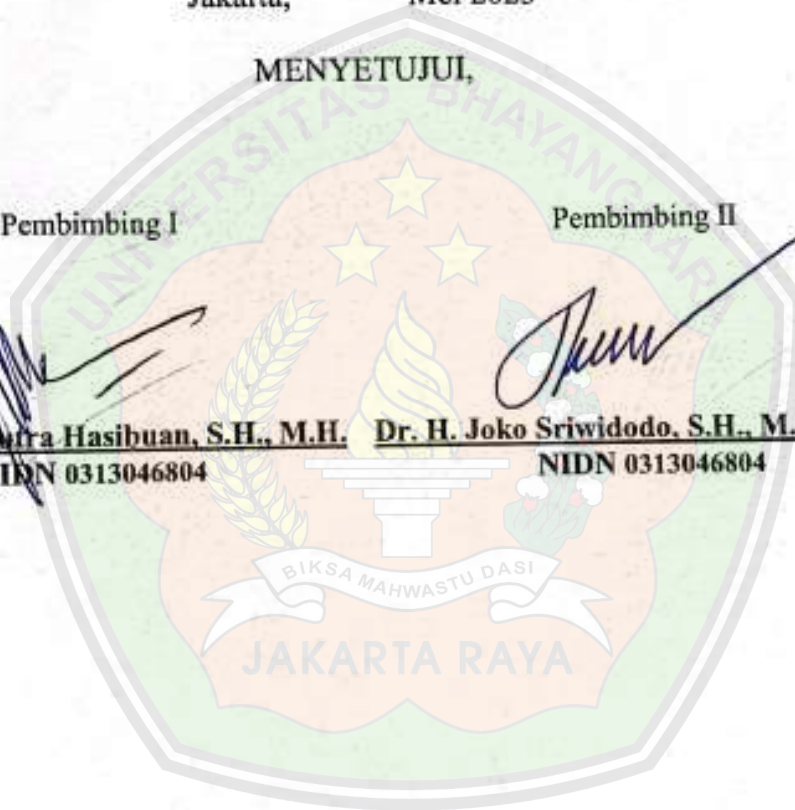
MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN 0313046804


Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn.
NIDN 0313046804



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penegakan Hukum Bagi Anak Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pendekatan Diskresi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Nama Mahasiswa : Ramadhan Sofyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251004

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 2 Juni 2025

Bekasi, Juni 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji
Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum
NIDN 8976950022

Penguji I
Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn
NIDN 0316097103

Penguji II
Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN 0313046804

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN 0313046804

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIDN 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ramadhan Sofyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251004

Tempat Tanggal Lahir : Raha, 11 Juni 1984

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul " Penegakan Hukum Bagi Anak Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pendekatan Diskresi Dalam Sistem Peradilan Pidana" adalah benar-benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, Maret 2025

Yang membuat pernyataan,




Ramadhan Sofyan
NPM 202320251004

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ramadhan Sofyan
Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251004
Tempat Tanggal Lahir : Raha, 11 Juni 1984
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Bagi Anak Turut Serta Pelaku Tindak Pidana Terorisme Pendekatan Diskresi Dalam Sistem Peradilan Pidana” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

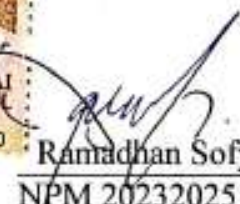
Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2025

Yang membuat pernyataan,




Ramadhan Sofyan
NPM 202320251004

ABSTRAK

Ramadhan Sofyan, 202320251004, 2025

Tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun, sehingga menimbulkan hambatan yuridis dalam penerapan mekanisme diversi dan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menyatakan bahwa diversi hanya dapat diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme secara normatif tidak memenuhi syarat diversi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaturan hukum terkait penanganan anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana terorisme, serta (2) penerapan prinsip diskresi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, serta studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data.

Penelitian ini didasarkan pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori keadilan restoratif menurut Muladi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum mengenai anak pelaku terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, proses hukum terhadap anak tetap harus merujuk pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang SPPA, termasuk perlindungan anak, keadilan restoratif, dan penggunaan diskresi sebagai upaya pemulihan. Banyak anak pelaku terorisme merupakan korban eksploitasi dan indoktrinasi, sehingga perlu pendekatan humanis yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga pemulihan dan reintegrasi sosial. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan prinsip diskresi, khususnya dalam bentuk pendekatan keadilan restoratif, sangat penting dalam menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kerangka hukum yang lebih fleksibel, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan restoratif secara lebih maksimal.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Diskresi, Diversi, Keadilan Restoratif, Anak, Tindak Pidana Terorisme

ABSTRACT

Ramadhan Sofyan, 202320251004, 2025

Terrorism crimes are categorized as extraordinary crimes with a criminal threat of more than 7 years, thus creating legal obstacles in the application of diversion mechanisms and restorative justice approaches in the juvenile criminal punishment system in Indonesia. Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) states that diversion can only be applied to criminal acts with a criminal threat of less than seven years and is not a criminal offense. Therefore, children who participate in acts of terrorism do not normatively meet the requirements for diversion. This study aims to analyze (1) legal regulations related to the handling of children and perpetrators and in acts of terrorism, and (2) the application of the principle of discretion in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The research method used is normative legal with a descriptive analytical approach, and document studies as data collection techniques.

This study is based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory and Muladi's restorative justice theory. The results of the study show that although the legal provisions regarding child perpetrators of terrorism are regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the legal process for children must still refer to the principles in the SPPA Law, including child protection, restorative justice, and the use of discretion as an effort to restore. Many child perpetrators of terrorism are victims of exploitation and indoctrination, so a humanist approach is needed that does not only emphasize punishment, but also recovery and social reintegration. The conclusion of this study is that the application of the principle of discretion, especially in the form of a restorative justice approach, is very important in dealing with children involved in criminal acts. The suggestion from this study is the need to strengthen a more flexible legal framework, as well as training for law enforcement officers in implementing a restorative approach more optimally..

Keywords: Juvenile Criminal Justice System, Discretion, Diversion, Restorative Justice, Children, Terrorism Crimes

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan karya ilmiah Tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PENDEKATAN DISKRESI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA.”**

Penyusunan karya ilmiah Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Program Studi Magister Ilmu Hukum. Penyusunannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., selaku Plt Dekan Fakultas Hukum.
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus dosen Pembimbing Materi, yang senantiasa selalu memberikan bimbingan, dukungan serta arahnya dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
6. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Teknis yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahnya dalam penelitian ini, dengan segala keterbatasan penulis, dukungan yang

diberikan memberikan penulis semangat baru sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

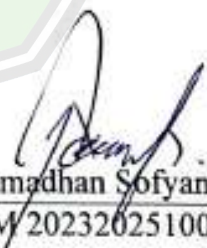
8. Kepada seluruh Dosen dan staf akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
9. Kepada kedua Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Kepada Isri dan Anak penulis yang selalu menjadi alasan mengapa penulis harus sesegera mungkin menyelesaikan pendidikan S-2.
11. Teman-teman seperjuangan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu mendukung satu dan lainnya untuk bisa menyelesaikan studi ini bersama-sama.

Dalam penyusunan karya ilmiah Tesis ini, tidak ada gading yang tak retak, peneliti menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan baik. Akhir kata, penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru di masa depan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi perlindungan bagi kita semua.

Jakarta,

Maret 2025

Yang membuat pernyataan,


Ramadhan Sofyan
NPM/202320251004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.5. Kerangka Konseptual	9
1.6. Kerangka Teori	10
1.7. Kerangka Pemikiran	18
1.8. Penelitian Terdahulu	19
1.9. Metode Penelitian	20
 BAB II KERANGKA TEORITIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA TERORISME	22
2.1. Konsep Dasar tentang Anak dalam Hukum Pidana	22
2.1.1. Pengertian Anak	22
2.1.2. Penetapan Batas Usia Anak	33

2.2. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	36
2.3. Anak Turut Serta dalam Hukum Pidana	41
2.4. Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum	44
2.4.1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	44
2.4.2. Peran Anak dalam Jaringan Terorisme	50
2.4.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme	53
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA TERORISME	58
3.1. Analisis Yuridis terhadap Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan	58
3.2. Contoh Kasus Anak Turut Serta Dalam Tindak Pidana Terorisme	72
BAB IV PENGATURAN HUKUM DAN PENERAPAN PRINSIP DISKRESI DALAM PENANGANAN ANAK TURUT SERTA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME	83
4.1. Pengaturan Hukum Dalam Penanganan Anak Turut Serta Dalam Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	83
4.2. Penerapan Prinsip Diskresi Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme	99
BAB V PENUTUP	113
5.1. Simpulan	113
5.2. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115